

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja APBD pada BKAPD Kabupaten Sumba Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis kinerja anggaran pendapatan daerah dengan realisasinya pada BKAPD tahun anggaran 2015–2017 dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendapatan pada BKAPD telah sangat efektif. Hal ini dapat terlihat pada hasil persentase kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2015-2017 yaitu 178%, 215% dan 100%. Efektifitas PAD berada pada tingkat sangat efektif yaitu 112%, 116% dan 112%.
2. Hasil dari analisis kinerja anggaran belanja daerah dengan realisasinya pada BKAPD tahun 2015-2017 untuk keserasian belanja berada pada tingkatan sangat baik yaitu 91%, 85% dan 88%
3. Efisiensi belanja pada BKAPD untuk tahun 2015 berada pada tingkatan cukup efisien yaitu 85%, dan 2016 berada pada tingkatan efisien yaitu 78%. Pada tahun 2017 tingkatan efisiensi belanja pada BKAPD berada pada tingkatan kurang efisien yaitu 98%.

5.2. Saran

Setelah mengetahui kesimpulan dari hasil terhadap kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015–2017 pada

BKAPD Kabupaten Sumba Barat, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah sebaiknya BKAPD lebih meningkatkan pendapatan agar pada tahun selanjutnya BKAPD dapat mempertahankan keefektifan pengelolaan pendapatan.
2. Dalam perekapan pelaporan sebaiknya BKAPD lebih cepat dalam melakukan perekapan laporan APBD agar mempermudah perhitungan rasio dan penentuan anggaran untuk tahun selanjutnya.
3. Dalam pengelolaan belanja sebaiknya BKAPD lebih melakukan penghematan agar tingkat efisiensi belanja lebih rendah dan tidak terjadi pemborosan.
4. Untuk meningkatkan PAD yang merupakan sumber penerimaan terbesar BKAPD dapat melakukan beberapa cara seperti :

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Dalam lima tahun mendatang, kemampuan keuangan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia akan ditingkatkan dengan mengandalkan pada Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan Pajak Daerah. Namun demikian, kekuatan pembaharuan yang diajukan sebagai strategi barunya adalah pada aksentuasi manajemen pengelolaan dan audit kerjanya.

b. Pengembangan Kerjasama dalam Menggali PAD

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah,

akan dikembangkan strategi baru yang tidak semata berorientasi pada intensifikasi maupun ekstensifikasi retribusi dan Pajak Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahman, E., & Indriani, E. (2007). *Membina Kompetensi Ekonomi untuk kelas XI*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan* (pertama ed.). Jakarta: @kademia.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Djuanda, D. M. (2010). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlianto, D. (2014). *Anggaran Keuangan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Ibrahim, A. (2013). *pengertian analisa menurut ahli*. Retrieved oktober senin, tanggal 2, 2017, from <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>
- Kenza, A. (2013, januari 16). *makalah pengawasan APBD*. Retrieved desember27, 2017, from <http://langitkelamtanpailmu.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pengawasan-apbd.html>
- Kurniawan, A. (2015). *13 pengertian analisis menurut para ahli didunia*. Retrieved oktober senin, tanggal 2, 2017, from <http://www.gurupendidikan.co.id/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Menteri, D. D. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia.
- Pinto, S. (2011, November rabu tanggal 16). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Retrieved september minggu tanggal 24, 2017, from cintaimabar.blogspot.co.id
- Poerwanto, H. (2013). *Pengertian, manfaat, dan tujuan anggaran perusahaan*. Retrieved oktober rabu, tanggal 11, 2017, from <https://sites.google.com>
- Presiden, R. I. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang Keuangan Negara tahun 2003.
- Presiden, R. I. (2004). Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, Jakarta, DKI Jakarta.
- Presiden, R. I. (2004). Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.
- Presiden, R. I. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Republik Indonesia.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual* (pertama ed.). Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudaryo, Y., Ayu, N., & S, D. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.

themes, a.-i. &. (2013). *belajar psikologi - metode pengumpulan data*. Retrieved bulan September minggu, tanggal 24, 2017, from <http://belajarpikologi.com/metode-pengumpulan-data/#>

Yumardi, F. (2010). *Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*, Mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Riau.

